

**LAPORAN KEGIATAN KOMISI I DPR RI
DALAM MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2019-2020
TANGGAL 1 OKTOBER 2019 – 12 JANUARI 2020
(Masa Sidang Mulai Tanggal 1 Oktober – 17 Desember 2019
dan Masa Reses Mulai Tanggal 18 Desember 2019 – 12 Januari 2020)**

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 58 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 - 2020 adalah sebagai berikut:

I. FUNGSI LEGISLASI

Dalam bidang legislasi, Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 - 2020 telah menyampaikan Usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024 dan Usulan RUU Prioritas Komisi I DPR RI Tahun 2020 kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 31 Oktober 2019 dan 13 November 2019 sebagai berikut:

1. Usulan Prolegnas Komisi I DPR RI Tahun 2020 – 2024

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG – UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH
1.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR
3.	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR
4.	RUU tentang Keamanan Laut	DPR
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	Pemerintah
6.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	Pemerintah

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG – UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH
7.	RUU tentang Rahasia Negara	Pemerintah
8.	RUU tentang Keamanan Nasional	Pemerintah
9.	RUU tentang Konvergensi Telematika	Pemerintah
10.	RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi	Pemerintah
11.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Pemerintah

2. **RUU Prioritas Komisi I DPR RI Tahun 2020 sebagai berikut:**
- a. **RUU Prioritas Usul Inisiatif Komisi I DPR RI Tahun 2020, yaitu:**
- 1) RUU tentang Penyiaran
 - 2) RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
- b. **RUU Prioritas Usul Inisiatif Pemerintah Tahun 2020, yaitu:**
- 1) RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi
 - 2) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

II. **FUNGSI ANGGARAN**

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, Komisi I DPR RI tidak melaksanakan Rapat Anggaran, karena tidak adanya penjadwalan Rapat Anggaran oleh Badan Anggaran DPR RI.

III. **FUNGSI PENGAWASAN**

Terkait dengan fungsi pengawasan, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 Komisi I DPR RI telah melaksanakan:

A. **RAKER/RDP/RDPU DENGAN MITRA KERJA KOMISI I DPR RI**

1. **RDP Komisi I DPR RI dengan Lembaga Sensor Film pada 4 November 2019 dalam rangka Laporan Kinerja LSF Periode 2015-2019**

Dalam RDP tersebut, Komisi I DPR RI:

- 1) dapat menerima penjelasan Ketua dan Anggota Lembaga Sensor Film (LSF) mengenai Laporan Kinerja LSF Periode 2015-2019 dan memberikan apresiasi atas kinerja LSF Periode 2015-2019.
- 2) mendorong LSF Periode 2015-2019 untuk segera membenahi hal-hal yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi LSF ke depan. Untuk itu, LSF agar melakukan hal-hal antara lain:
 - a. peningkatan eselonisasi sekretariat
 - b. penyesuaian tarif sensor dan penyelesaian status tarif sensor tidak termasuk PNB
 - c. perlunya peningkatan sosialisasi budaya Sensor Mandiri menjadi gerakan nasional
 - d. perlunya dilakukan riset tentang korelasi penyensoran film terhadap isu sosial di Indonesia
 - e. peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perbaikan regulasi terkait penyensoran film terutama masalah dubbing, pengaturan jam tayang di televisi, klasifikasi usia penonton, penegakan hukum, dan film berbasis media internet.
- 3) mendorong LSF ke depan untuk mengoptimalkan perannya di tengah era globalisasi dan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga mampu melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film sehingga tetap menjaga jati diri, karakter, dan ketahanan bangsa.
- 4) melalui Pimpinan DPR RI, akan berkoordinasi dengan Komisi X DPR RI, agar LSF setiap tahunnya diikutsertakan dalam pembahasan anggaran Kemendikbud yang didalamnya termasuk anggaran LSF.

2. Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo pada tanggal 5 November 2019 dalam rangka membahas rencana kerja Kemkominfo Tahun 2020 beserta dukungan anggarannya dan isu-isu aktual di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam Rapat tersebut, Komisi I DPR RI:

- 1) mendorong Kemkominfo untuk melaksanakan program Kerja yang sinergi dengan program sebelumnya sehingga tercipta kesinambungan program yang mampu mendorong pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara menyeluruh.
- 2) bersepakat dengan Kemkominfo untuk memasukkan sebagai RUU Prioritas Prolegnas Tahun 2020 untuk pembahasan RUU Penyiaran dan RUU Perlindungan Data Pribadi mengingat kedua RUU tersebut diperlukan guna mengatur berbagai hal strategis terkait perkembangan teknologi dan migrasi

penyiaran digital dan kejahatan penyalahgunaan data pribadi. Terkait RUU Perlindungan Data Pribadi, Komisi I DPR RI bersepakat dengan Kemkominfo untuk membahas draft RUU tersebut selambat-lambatnya pada awal tahun 2020.

- 3) mendesak Kemkominfo untuk terus meningkatkan peran sebagai leading sector program Government Public Relation sehingga mampu mengkoordinasikan kelembagaan/kementerian lain untuk dapat menyampaikan kebijakan dan program kerja Pemerintah dengan baik, cepat, dan informatif ke seluruh masyarakat.
- 4) mendesak Kemkominfo untuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, guna memastikan bahwa Roadmap Pengamanan Siber mampu mengantisipasi berbagai ancaman kejahatan siber dan melindungi sistem pengamanan infrastruktur dan sumber daya vital di Indonesia.
- 5) mendesak Kemkominfo untuk mensosialisasikan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dapat melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah Indonesia.
- 6) mendesak Kemkominfo untuk melanjutkan target konektivitas digital termasuk penyediaan BTS, akses internet, dan satelit multi fungsi. Sehubungan hal tersebut, Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk pemenuhan anggaran dimaksud.

3. Raker Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan tanggal 6 November 2019 dalam rangka membahas rencana kerja TNI beserta dukungan anggarannya dan isu-isu aktual di bidang pertahanan

Rapat dilaksanakan dalam Rapat bersifat tertutup.

4. Raker Komisi I DPR RI dengan Menhan pada tanggal 11 November 2019 dalam rangka membahas rencana kerja Kemhan Tahun 2020 beserta dukungan anggarannya dan isu-isu aktual di bidang pertahanan

Rapat dilaksanakan dalam Rapat bersifat tertutup.

5. **Raker Komisi I DPR RI dengan Menlu pada tanggal 12 November 2019 dalam rangka membahas rencana kerja Kemlu Tahun 2020 beserta dukungan anggarannya dan isu-isu aktual di bidang luar negeri**

Rapat dilaksanakan dalam Rapat bersifat tertutup.

6. **Raker Komisi I DPR RI dengan Kepala BSSN pada tanggal 13 November 2019 dalam rangka membahas rencana kerja BSSN Tahun 2020 beserta dukungan anggarannya dan isu-isu aktual terkait BSSN**

Rapat dilaksanakan dalam Rapat bersifat tertutup.

7. **RDP Komisi I DPR RI dengan Gubernur Lemhannas pada tanggal 18 November 2019 dalam rangka membahas rencana kerja Lemhannas Tahun 2020 beserta dukungan anggarannya dan isu-isu aktual terkait Lemhannas**

Dalam RDP tersebut, Komisi I DPR RI:

- 1) mengapresiasi penjelasan Gubernur Lemhannas terkait Rencana Kerja dan Anggaran Lemhannas Tahun Anggaran 2020, beserta usulan tambahan anggaran Lemhannas Tahun Anggaran 2020. Lebih lanjut, Komisi I DPR RI meminta Lemhannas agar usulan tambahan anggaran tersebut diajukan dalam APBN Perubahan T.A. 2020.
- 2) mendukung penguatan kelembagaan Lemhannas melalui perundangundangan, sehingga tugas dan fungsi Lemhannas dalam penyiapan kader pimpinan nasional dan kajian permasalahan bangsa lebih optimal.
- 3) mendesak Lemhannas untuk terus meningkatkan kapasitas kajian dalam penyelesaian berbagai permasalahan kebangsaan dan isu-isu strategis nasional, sehingga hasil kajian Lemhannas dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan nasional.

8. **RDP Komisi I DPR RI dengan Sesjen Wantannas pada tanggal 18 November 2019 dalam rangka membahas rencana kerja Wantannas Tahun 2020 beserta dukungan anggarannya dan isu-isu aktual terkait Wantannas**

Dalam RDP tersebut, Komisi I DPR RI:

- 1) mengapresiasi penjelasan Sekretaris Jenderal Wantannas terkait Rencana Kerja dan Anggaran Wantannas Tahun Anggaran 2020. Lebih lanjut, Komisi I DPR RI mendukung peningkatan anggaran Wantannas untuk peningkatan kinerja Wantannas.

- 2) meminta Wantannas untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar diproses sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku terkait dengan usulan tambahan anggaran penyesuaian Wantannas Tahun Anggaran 2020
- 3) mendesak Wantannas untuk mengoptimalkan koordinasi dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI dalam melakukan pengkajian strategis masalah aktual yang berkaitan dengan ketahanan nasional.
- 4) mendesak Wantannas untuk mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan Ketua Wantannas.

9. RDP Komisi I DPR RI dengan Kepala Bakamla pada tanggal 19 November 2019 dalam rangka membahas rencana kerja Bakamla Tahun 2020 beserta dukungan anggarannya dan isu-isu aktual terkait Bakamla

Dalam RDP tersebut, Komisi I DPR RI:

- 1) mengapresiasi penjelasan Kepala Bakamla RI terkait Rencana Kerja dan Anggaran Bakamla RI Tahun Anggaran 2020. Lebih lanjut, Komisi I DPR RI secara prinsip mendukung peningkatan anggaran Bakamla RI agar lebih optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Komisi I DPR RI meminta Bakamla untuk melakukan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam melaksanakan operasi keamanan di perairan Indonesia, sehubungan dengan keterbatasan alokasi anggaran Bakamla RI Tahun Anggaran 2020.
- 3) mendorong Bakamla RI untuk secara efektif melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum di laut dalam keterbatasan regulasi yang ada. Untuk itu, Komisi I DPR RI mendukung penguatan Bakamla RI melalui perundang-undangan

10. RDP Komisi I DPR RI dengan Dewas dan Direksi LPP RRI pada tanggal 19 November 2019 dalam rangka membahas rencana kerja LPP RRI Tahun 2020 beserta dukungan anggarannya dan isu-isu aktual terkait RRI

Dalam RDP tersebut, Komisi I DPR RI:

- 1) mengapresiasi penjelasan Ketua Dewas dan Direktur Utama LPP RRI terkait Rencana Kerja dan Anggaran LPP RRI Tahun Anggaran 2020. Lebih lanjut, Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI untuk terus melakukan peningkatan kinerja sehingga ke depan dapat menjalankan tupoksi secara optimal.
- 2) mendorong LPP RRI untuk terus meningkatkan peran sebagai Government Public Relation dengan menyampaikan informasi terkait kebijakan, program,

dan pencapaian kinerja Pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk di wilayah perbatasan NKRI.

- 3) mendorong LPP RRI untuk lebih banyak melibatkan generasi millennial, baik sebagai bagian dari tim kerja maupun sebagai pendengar dan pemirsa dengan mengakomodir ide-ide kreatif dan inovatif, sehingga keberadaan LPP RRI dapat lebih menjangkau generasi muda Indonesia.
- 4) mendorong LPP RRI untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kompetensi untuk pengembangan LPP RRI ke depan yang lebih baik

11. RDP Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat pada tanggal 2 Desember 2019 dalam rangka membahas rencana kerja KPI Pusat Tahun 2020 beserta dukungan anggarannya dan isu-isu aktual terkait KPI Pusat

Dalam RDP tersebut, Komisi I DPR RI:

- 1) telah mendengarkan penjelasan dari Ketua KPI Pusat terkait dengan Rencana Kerja Tahun 2020. Sehubungan hal tersebut, Komisi I DPR RI mendorong KPI Pusat untuk menjalankan tugas pokok secara optimal sehingga media penyiaran mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial.
- 2) mendesak KPI Pusat segera mempercepat revisi Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3SPS) agar tercipta kepastian hukum terkait mekanisme pemberian sanksi yang lebih tegas dan konsisten terhadap Lembaga Penyiaran.
- 3) mendesak KPI Pusat untuk menerapkan metodologi pengawasan isi siaran yang akurat dan cepat dengan dukungan sarana prasarana yang sesuai dengan perkembangan teknologi penyiaran di era digital.
- 4) mendorong KPI Pusat untuk meningkatkan koordinasi dengan KPI Daerah sehingga tercipta sinergi dalam melakukan pengawasan isi siaran terhadap Lembaga Penyiaran di Pusat dan Daerah.
- 5) mendesak KPI Pusat untuk memperhatikan penyiaran di wilayah perbatasan sehingga keberadaan media penyiaran mampu memperkuat integrasi nasional. Terkait hal tersebut, Komisi I DPR RI mendorong KPI Pusat untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

12. RDP Komisi I DPR RI dengan Dewas dan Direksi LPP TVRI pada tanggal 2 Desember 2019 dalam rangka membahas rencana kerja LPP TVRI Tahun 2020 beserta dukungan anggarannya dan isu-isu aktual terkait LPP TVRI

Dalam RDP tersebut, Komisi I DPR RI:

- 1) telah mendengarkan penjelasan dari Dewas dan Dirut LPP TVRI mengenai Rencana Kerja LPP TVRI Tahun 2020. Sehubungan hal tersebut, Komisi I DPR RI mendorong LPP TVRI untuk menjalankan tugas pokok secara optimal sehingga mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial.
- 2) mendorong LPP TVRI untuk segera menyelesaikan persoalan pencairan honor SKK karyawan LPP TVRI paling lambat 31 Desember 2019. Sehubungan hal tersebut, Komisi I DPR RI meminta LPP TVRI untuk secara rutin menyampaikan progress report penyelesaian honor SKK karyawan LPP TVRI dalam bentuk tertulis kepada Komisi I DPR RI.
- 3) meminta LPP TVRI untuk memberikan jawaban tertulis terkait semua pertanyaan yang disampaikan dalam RDP Komisi I DPR RI dengan Dewas dan Direksi LPP TVRI yang diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2019, paling lambat tanggal 9 Desember 2019.

12. RDP Komisi I DPR RI dengan Dewan Pers pada tanggal 3 Desember 2019 dalam rangka membahas rencana kerja Dewan Pers Tahun 2020 beserta dukungan anggarannya dan isu-isu aktual terkait Dewan Pers

Dalam RDP tersebut, Komisi I DPR RI:

- 1) telah mendengarkan penjelasan dari Ketua Dewan Pers terkait dengan Rencana Kerja Tahun 2020. Sehubungan hal tersebut, Komisi I DPR RI mendorong Dewan Pers untuk terus melakukan penguatan kelembagaan sehingga Dewan Pers mampu menjalankan tugas pokoknya secara optimal di era Digital.
- 2) mendorong Dewan Pers untuk terus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. peningkatan SDM bidang Pers yang berkualitas dan berdaya saing serta pengetatan persyaratan wartawan sehingga profesionalisme dan kompetensi wartawan dapat terus ditingkatkan.
 - b. peningkatan kualitas Lembaga Pers sehingga semua perusahaan pers dapat terverifikasi dan menurunnya jumlah pengaduan terhadap perusahaan pers terkait produk jurnalistik yang melanggar kode etik.
 - c. peningkatan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait tugas pokok Dewan Pers.

- d. penguatan lembaga pers yang berada di wilayah perbatasan sehingga media dapat berperan dalam memperkokoh integrasi nasional.
- 3) mendukung peningkatan anggaran Dewan Pers agar mampu melaksanakan program kerja dan kegiatan secara optimal guna mencapai sasaran strategis Dewan Pers Tahun 2020 – 2024

13. RDP Komisi I DPR RI dengan Perum LKBN Antara pada tanggal 3 Desember 2019 dalam rangka membahas rencana kerja Perum LKBN Antara Tahun 2020 dan isu-isu aktual terkait Perum LKBN Antara

Dalam RDP tersebut, Komisi I DPR RI:

- 1) telah mendengarkan penjelasan dari Direktur Utama Perum LKBN ANTARA terkait dengan Rencana Kerja Perum LKBN ANTARA Tahun 2020. Sehubungan hal tersebut, Komisi I DPR RI mendorong Perum LKBN ANTARA untuk terus melakukan penguatan kelembagaan sehingga mampu menjalankan tugas sebagai kantor berita rujukan yang akurat dan terpercaya.
- 2) mendesak Perum LKBN ANTARA untuk mengedepankan penyebarluasan informasi baik di dalam maupun di luar negeri dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam tata kelola perusahaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- 3) mendesak Perum LKBN ANTARA untuk menerapkan sistem manajemen yang mampu menciptakan kondisi internal perusahaan lebih kondusif sehingga semua karyawan mampu bekerja dengan optimal.
- 4) mendesak Perum LKBN ANTARA untuk melakukan sinergi dengan LPP RRI dan LPP TVRI melalui pembentukan national newsroom guna meningkatkan diseminasi informasi ke seluruh pelosok Indonesia

14. RDP Komisi I DPR RI dengan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 4 Desember 2019 dalam rangka membahas rencana kerja Komisi Informasi Pusat Tahun 2020 beserta dukungan anggarannya dan isu-isu aktual terkait Komisi Informasi Pusat

Dalam RDP tersebut, Komisi I DPR RI:

- 1) telah mendengarkan penjelasan dari Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat terkait dengan Rencana Kerja Tahun 2020. Sehubungan hal tersebut, Komisi I DPR RI mendorong KI Pusat untuk terus melakukan penguatan kelembagaan sehingga mampu menjalankan tugas pokoknya secara optimal.
- 2) mendorong KI Pusat untuk terus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan penyelesaian sengketa informasi sehingga semua pengaduan yang diajukan masyarakat dapat diselesaikan dengan optimal.

- b. Mendorong Badan Publik untuk terus meningkatkan pelayanan terkait permohonan informasi publik sehingga nantinya Indeks Keterbukaan Informasi Publik dapat tercapai dan terukur.

B. KUNJUNGAN KERJA

1. KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Disamping melaksanakan Rapat-Rapat bersama Mitra Kerja Komisi I DPR RI, untuk mengetahui kondisi faktual terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi I DPR RI, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 Komisi I DPR RI telah melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi:

- a. Papua dan Papua Barat pada tanggal 7-10 November 2019 dalam rangka mengetahui mengetahui langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan Pemerintah terkait penanganan kondisi di Papua dan Papua Barat serta untuk mengetahui upaya Kodam Cenderawasih dan Kasuari dalam deteksi dini dan cegah dini dalam menangkal gerakan separatisme.
- b. Jawa Barat dan Jawa Timur pada tanggal 14-16 November 2019 dalam rangka mengetahui Kesiapan Industri Pertahanan Nasional dan Industri Pertahanan Swasta Nasional dalam memenuhi kebutuhan Alutsista TNI.
- c. Jawa Barat dan Jawa Tengah tanggal 21-23 November dalam rangka mengetahui Kesiapan Industri Pertahanan Nasional dan Industri Pertahanan Swasta Nasional dalam memenuhi kebutuhan Alutsista TNI.
- d. Jawa Barat dan Banten tanggal 11-13 Desember 2019 dalam rangka mengetahui Kesiapan Alutsista, Sarana-Prasarana dan Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Korem 051 dan Korem 052

2. KUNJUNGAN KERJA LUAR NEGERI

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, Komisi I DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Negeri dalam rangka memenuhi undangan Duta Besar/Wakil Tetap RI untuk PBB/WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa untuk memberikan dukungan kebijakan dan diplomasi parlementer dalam forum internasional guna menunjang keberhasilan partisipasi Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB ke Jenewa – Swiss pada tanggal 14-18 Desember 2019.

3. KUNJUNGAN KERJA RESES

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi I DPR RI di daerah, pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, yaitu pada tanggal 19-22 Desember 2019, Komisi I DPR RI melaksanakan Kunker ke Provinsi:

- a. Sumatera Barat;
- b. Sulawesi Utara
- c. Kalimantan Tengah

C. PERTEMUAN DENGAN DUBES/DELEGASI NEGARA SAHABAT ATAU KUNJUNGAN DARI DELEGASI NEGARA SAHABAT

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, Komisi I DPR RI juga telah melaksanakan pertemuan dengan Dubes/Delegasi Negara Sahabat atau menerima kunjungan dari Delegasi Negara Sahabat, yaitu:

1. Pertemuan dengan Dubes Singapura di Jakarta, H.E. Mr. Anil Kumar Nayar
2. Pertemuan dengan US Department of Commerce Policy Advisor, Mr. Michael Rose
3. Pertemuan dengan Dubes Rusia di Jakarta, H.E. Mrs. Lyudmila Vorobieva
4. Pertemuan dengan Dubes Norwegia, H.E. Mr. Vegard Kaale
5. Pertemuan dengan Menteri Konselor Bidang Politik dan Komunikasi Strategis, Kedubes Australia, Mr. Dr, Dave Peebles
6. Pertemuan dengan Dubes Korsel di Jakarta, Mr. Kim Chang-beon
7. Pertemuan dengan Head of Public Policy Amazon Web Service, Dimas Ramadhan

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020.

Jakarta, 17 Desember 2019
KABAGSET. KOMISI I DPR RI,

SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si.
NIP. 19710106 199003 2 001